



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 21 April 2020

Nomor : 270/2931/SJ  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan  
Gubernur, Bupati dan Wali Kota  
Tahun 2020.

Yth. 1. Sdr/i. Gubernur  
2. Sdr/i. Bupati/Wali Kota  
(daftar terlampir)

di -  
Tempat

Sebagai tindaklanjut Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan memperhatikan hasil Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2020, dengan ini disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 telah menunda 4 (empat) tahapan pemungutan suara pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak Tahun 2020, yaitu Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan, Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), serta Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.
2. Berdasarkan hasil Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat tanggal 14 April 2020 disepakati dari 3 (tiga) Opsi Penundaan yang diajukan oleh KPU RI, Pemerintah mengambil kebijakan Opsi Optimis yaitu pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak Tahun 2020 digelar pada Bulan Desember Tahun 2020 dari yang semestinya dilakukan pada Bulan September Tahun 2020 atau menunda tahapan selama 3 (tiga) Bulan.

3. Sambil menunggu tindak lanjut kebijakan penundaan tahapan pemungutan suara pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang telah menganggarkan Pendanaan hibah kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota pada APBD TA 2020 tidak mengalihkan pendanaan hibahnya untuk kegiatan lainnya.
4. Pendanaan hibah kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota pada APBD TA 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 3, tetap dianggarkan di SKPKD dan tidak melakukan pencairan dana sesuai tahap dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kecuali sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 sebagaimana dimaksud pada angka 1.
5. Pencairan dana hibah akibat penundaan tahapan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada angka 4, mempedomani:
  - a. Penyelenggara (Komisi Pemilihan Umum/Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum/Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota)
    - 1) Dalam hal Pemerintah Daerah telah melakukan pencairan dana hibah secara bertahap atau sekaligus sesuai NPHD, dana hibah digunakan untuk kebutuhan pengeluaran tahapan Pilkada termasuk biaya sewa dibayar dimuka sampai dengan ditetapkannya keputusan penundaan tahapan dari KPU. Apabila masih terdapat sisa dana hibah, tetap disimpan pada rekening penyelenggara dan selanjutnya diperhitungkan pada pencairan berikutnya ketika ditetapkan pencabutan penundaan tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2) Dalam hal Pemerintah Daerah telah melakukan pencairan dana hibah sesuai tahap pencairan dalam NPHD dan tidak terdapat kekurangan untuk kebutuhan pengeluaran tahapan Pilkada yang sudah dilakukan termasuk biaya sewa dibayar dimuka sampai dengan keputusan penundaan tahapan dari KPU, Pemerintah Daerah tidak melakukan pencairan pendanaan hibah berikutnya; dan
    - 3) Dalam hal Pemerintah Daerah telah melakukan pencairan dana hibah sesuai tahap pencairan dalam NPHD dan terdapat kekurangan atau belum melakukan pencairan dana hibah sesuai tahap pencairan dalam NPHD, Pemerintah Daerah wajib melakukan pencairan dana hibah sebesar kewajiban termasuk biaya sewa dibayar dimuka sampai dengan keputusan penundaan tahapan dari KPU.
  - b. Pengamanan (POLRI dan TNI) serta program dan kegiatan pada Perangkat Daerah terkait:

- 1) Dalam hal Pemerintah Daerah telah melakukan pencairan dalam bentuk hibah atau program dan kegiatan, sesuai NPHD atau jadwal program dan kegiatan yang telah disepakati sampai dengan keputusan penundaan tahapan dari KPU, Pemerintah Daerah tidak melakukan pencairan pendanaan hibah atau program dan kegiatan berikutnya. Apabila masih terdapat sisa dana hibah pada pengamanan, tetap disimpan pada rekening pengamanan dan selanjutnya diperhitungkan pada pencairan berikutnya ketika ditetapkan pencabutan penundaan tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum melakukan pencairan dalam bentuk hibah atau program dan kegiatan kepada pihak Pengamanan atau Perangkat Daerah terkait sampai dengan keputusan penundaan tahapan dari KPU, Pemerintah Daerah tidak melakukan pencairan dana hibah atau program dan kegiatan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Menteri Dalam Negeri

Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
5. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia;
6. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
7. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia;
8. Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
10. Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
12. Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
13. Ketua Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN  
SURAT MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 270/2951/SJ  
TENTANG PENJELASAN PELAKSANAAN  
KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI  
DAN WALI KOTA TAHUN 2020.

DAFTAR PROVINSI YANG MELAKSANAKAN  
KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR TAHUN 2020

1. Provinsi Sumatera Barat
2. Provinsi Jambi
3. Provinsi Bengkulu
4. Provinsi Kepulauan Riau
5. Provinsi Kalimantan Tengah
6. Provinsi Kalimantan Selatan
7. Provinsi Kalimantan Utara
8. Provinsi Sulawesi Utara
9. Provinsi Sulawesi Tengah



Menteri Dalam Negeri

Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D

**LAMPIRAN**  
**SURAT MENTERI DALAM NEGERI**  
**NOMOR : 270/2931/SJ**  
**TENTANG PENJELASAN PELAKSANAAN**  
**KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR,**  
**BUPATI DAN WALI KOTA TAHUN 2020.**

**DAFTAR KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN**  
**KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI/WALI KOTA TAHUN 2020**

1	Kabupaten Asahan	37	Kabupaten Batanghari	73	Kabupaten Bandung
2	Kabupaten Humbang Hasundutan	38	Kabupaten Bungo	74	Kabupaten Cianjur
3	Kabupaten Karo	39	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	75	Kabupaten Indramayu
4	Kabupaten Labuhanbatu	40	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	76	Kabupaten Karawang
5	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	41	Kabupaten Musi Rawas	77	Kabupaten Pangandaran
6	Kabupaten Labuhanbatu Utara	42	Kabupaten Musirawas Utara	78	Kabupaten Sukabumi
7	Kabupaten Mandailing Natal	43	Kabupaten Ogan Ilir	79	Kabupaten Tasikmalaya
8	Kabupaten Nias	44	Kabupaten Ogan Komering Ulu	80	Kabupaten Blora
9	Kabupaten Nias Barat	45	Kabupaten OKU Selatan	81	Kabupaten Boyolali
10	Kabupaten Nias Selatan	46	Kabupaten OKU Timur	82	Kabupaten Demak
11	Kabupaten Nias Utara	47	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	83	Kabupaten Grobogan
12	Kabupaten Pakpak Barat	48	kabupaten Bengkulu Selatan	84	Kabupaten Kebumen
13	Kabupaten Samosir	49	Kabupaten Bengkulu Utara	85	Kabupaten Kendal
14	Kabupaten Serdang Bedagai	50	Kabupaten Kaur	86	Kabupaten Klaten
15	Kabupaten Simalungun	51	Kabupaten Kepahiang	87	Kabupaten Pekalongan
16	Kabupaten Tapanuli Selatan	52	Kabupaten Lebong	88	Kabupaten Pemalang
17	Kabupaten Toba Samosir	53	Kabupaten Mukomuko	89	Kabupaten Purbalingga
18	Kabupaten Agam	54	Kabupaten Rejang Lebong	90	Kabupaten Purworejo
19	Kabupaten Dharmasraya	55	Kabupaten Seluma	91	Kabupaten Rembang
20	Kabupaten Lima Puluh Kota	56	Kabupaten Lampung Selatan	92	Kabupaten Semarang
21	Kabupaten Padang Pariaman	57	Kabupaten Lampung Tengah	93	Kabupaten Sragen
22	Kabupaten Pasaman	58	Kabupaten Lampung Timur	94	Kabupaten Sukoharjo
23	Kabupaten Pasaman Barat	59	Kabupaten Pesawaran	95	Kabupaten Wonogiri
24	Kabupaten Pesisir Selatan	60	Kabupaten Pesisir Barat	96	Kabupaten Wonosobo
25	Kabupaten Sijunjung	61	Kabupaten Way Kanan	97	Kabupaten Bantul
26	Kabupaten Solok	62	Kabupaten Bangka Barat	98	Kabupaten Gunung Kidul
27	Kabupaten Solok Selatan	63	Kabupaten Bangka Selatan	99	Kabupaten Sleman
28	Kabupaten Tanah Datar	64	Kabupaten Bangka Tengah	100	Kabupaten Banyuwangi
29	Kabupaten Bengkalis	65	Kabupaten Belitung Timur	101	Kabupaten Blitar
30	Kabupaten Indragiri Hulu	66	Kabupaten Bintan	102	Kabupaten Gresik
31	Kabupaten Kepulauan Meranti	67	Kabupaten Karimun	103	Kabupaten Jember
32	Kabupaten Kuantan Singingi	68	Kabupaten Kepulauan Anambas	104	Kabupaten Kediri
33	Kabupaten Pelalawan	69	Kabupaten Lingga	105	Kabupaten Lamongan
34	Kabupaten Rokan Hilir	70	Kabupaten Natuna	106	Kabupaten Malang
35	Kabupaten Rokan Hulu	71	Kabupaten Pandeglang	107	Kabupaten Mojokerto
36	Kabupaten Siak	72	Kabupaten Serang	108	Kabupaten Ngawi

109	Kabupaten Pacitan	156	Kabupaten Sumba Barat	203	Kabupaten Pulau Taliabu
110	Kabupaten Ponorogo	157	Kabupaten Sumba Timur	204	Kabupaten Asmat
111	Kabupaten Sidoarjo	158	Kabupaten Timor Tengah Utara	205	Kabupaten Boven Digoel
112	Kabupaten Situbondo	159	Kabupaten Bolmong Selatan	206	Kabupaten Keerom
113	Kabupaten Sumenep	160	Kabupaten Bolmong Timur	207	Kabupaten Membramo Raya
114	Kabupaten Trenggalek	161	Kabupaten Minahasa Selatan	208	Kabupaten Merauke
115	Kabupaten Tuban	162	Kabupaten Minahasa Utara	209	Kabupaten Nabire
116	Kabupaten Badung	163	Kabupaten Banggai	210	Kabupaten Pegunungan Bintang
117	Kabupaten Bangli	164	Kabupaten Banggai Laut	211	Kabupaten Supiori
118	Kabupaten Jembrana	165	Kabupaten Morowali Utara	212	Kabupaten Waropen
119	Kabupaten Karang Asem	166	Kabupaten Poso	213	Kabupaten Yahukimo
120	Kabupaten Tabanan	167	Kabupaten Sigi	214	Kabupaten Yalimo
121	Kabupaten Bengkayang	168	Kabupaten Tojo Una-Una	215	Kabupaten Fakfak
122	Kabupaten Kapuas Hulu	169	Kabupaten Toli-Toli	216	Kabupaten Pegunungan Arfak
123	Kabupaten Ketapang	170	Kabupaten Barru	217	Kabupaten Manokwari
124	Kabupaten Melawi	171	Kabupaten Bulukumba	218	Kabupaten Manokwari Selatan
125	Kabupaten Sambas	172	Kabupaten Gowa	219	Kabupaten Raja Ampat
126	Kabupaten Sekadau	173	Kabupaten Kepulauan Selayar	220	Kabupaten Luwu Utara
127	Kabupaten Sintang	174	Kabupaten Luwu Timur	221	Kabupaten Maros
128	Kabupaten Kotawaringin Timur	175	Kabupaten Toraja Utara	222	Kabupaten Pangkajene Kepulauan
129	Kabupaten Balangan	176	Kabupaten Buton Utara	223	Kabupaten Soppeng
130	Kabupaten Banjar	177	Kabupaten Kolaka Timur	224	Kabupaten Tana Toraja
131	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	178	Kabupaten Konawe Kepulauan	225	Kota Tangerang Selatan
132	Kabupaten Kotabaru	179	Kabupaten Konawe Selatan	226	Kota Depok
133	Kabupaten Tanah Bumbu	180	Kabupaten Konawe Utara	227	Kota Magelang
134	Kabupaten Berau	181	Kabupaten Muna	228	Kota Pekalongan
135	Kabupaten Kutai Barat	182	Kabupaten Wakatobi	229	Kota Semarang
136	Kabupaten Kutai Kertanegara	183	Kabupaten Bone Bolango	230	Kota Surakarta
137	Kabupaten Kutai Timur	184	Kabupaten Gorontalo	231	Kota Blitar
138	Kabupaten Mahakam Hulu	185	Kabupaten Pohuwato	232	Kota Pasuruan
139	Kabupaten Passer	186	Kabupaten Majene	233	Kota Surabaya
140	Kabupaten Bulungan	187	Kabupaten Belu	234	Kota Denpasar
141	Kabupaten Malinau	188	Kabupaten Sorong Selatan	235	Kota Banjarbaru
142	Kabupaten Nunukan	189	Kabupaten Teluk Bintuni	236	Kota Banjarmasin
143	Kabupaten Tana Tidung	190	Kabupaten Teluk Wondama	237	Kota Bitung
144	Kabupaten Bima	191	Kabupaten Kepulauan Sula	238	Kota Manado
145	Kabupaten Dompu	192	Kabupaten Mamuju	239	Kota Tomohon
146	Kabupaten Lombok Tengah	193	Kabupaten Mamuju Tengah	240	Kota Palu
147	Kabupaten Lombok Utara	194	Kabupaten Pasangkayu	241	Kota Makassar
148	Kabupaten Sumbawa	195	Kabupaten Buru Selatan	242	Kota Ternate
149	Kabupaten Sumbawa Barat	196	Kabupaten Kepulauan Aru	243	Kota Tidore Kepulauan
150	Kabupaten Sabu Raijua	197	Kabupaten Maluku Barat Daya	244	Kota Sungai Penuh
151	Kabupaten Malaka	198	Kabupaten Seram Bagian Timur	245	Kota Bandar Lampung
152	Kabupaten Manggarai	199	Kabupaten Halmahera Barat	246	Kota Metro
153	Kabupaten Manggarai Barat	200	Kabupaten Halmahera Selatan	247	Kota Batam
154	Kabupaten Ngada	201	Kabupaten Halmahera Timur	248	Kota Cilegon
155	Kabupaten Kaimana	202	Kabupaten Halmahera Utara	249	Kota Balikpapan

250 Kota Bontang  
251 Kota Samarinda  
252 Kota Mataram  
253 Kota Sibolga  
254 Kota Tanjung Balai

255 Kota Binjai  
256 Kota Gunung Sitoli  
257 Kota Medan  
258 Kota Pematang Siantar  
259 Kota Bukittinggi

260 Kota Solok  
261 Kota Dumai



Menteri Dalam Negeri

Prof. Dr. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D